

BAB 3

WORLD TRADE ORGANIZATION

Pola interaksi ekonomi tidak hanya berada pada lingkup domestik saja, tetapi sudah melewati batas negara. Interaksi internasional dalam bidang ekonomi ditandai dengan kerjasama antar negara. Ketentuan dan praktek-praktek kerjasama perdagangan internasional diatur oleh lembaga internasional yang melaksanakan tugasnya untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian tersebut. Dalam hal ini, WTO (*World Trade Organization*) yang memiliki peran sebagai lembaga internasional yang menjalankan tugas tersebut.

WTO dengan segala peraturan yang bertujuan untuk mengatur perdagangan antara negara, diharapkan dapat menciptakan lingkungan perdagangan internasional dengan baik, seimbang, adil dan kompetitif. Kepentingan-kepentingan besar negara, sebagai kepentingan nasionalnya, bertemu di forum ini dan siap untuk dinegosiasikan. Negosiasi dan diplomasi dilakukan oleh setiap negara anggota WTO untuk dapat menemukan suatu cara dan prosedur yang adil dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional tersebut. Tidak menutup kemungkinan terjadi gesekan-gesekan dan bentrokan kepentingan antar anggota selama berjalannya proses tersebut. Namun, yang harus dilakukan disini adalah menemukan titik temu atas persoalan tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

3.1. Proses Pembuatan Keputusan dalam WTO

WTO adalah suatu organisasi yang didasarkan pada *rules* (peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan), yang merupakan hasil keputusan dari perundingan oleh para pemerintah negara-negara anggota. Pencapaian kesepakatan adalah pilar utama dari suatu sistem perdagangan multilateral dan merupakan kontribusi unik WTO untuk menjaga stabilitas ekonomi global. Tanpa adanya tujuan untuk pencapaian kesepakatan, *rules-based system* yang melandasi WTO akan menjadi kurang efektif karena tidak ada wadah bagi pelaksanaannya. *Procedure* (aturan-aturan) WTO menekankan pada aturan hukum dan bertujuan

untuk membentuk sistem perdagangan yang lebih aman dan terukur. Sistem tersebut berjalan di atas aturan-aturan yang jelas dengan jadwal untuk penyelesaian sebuah kasus. Aturan pertama akan dipaparkan oleh panel dan disetujui (atau ditolak) oleh keseluruhan anggota WTO. Peninjauan ulang dari segi hukum mungkin untuk dilakukan. Prioritas utama selalu ditujukan untuk mencapai kesepakatan, melalui konsultasi bila dimungkinkan.¹

Pengambilan keputusan didasarkan dari konsensus yang dilakukan terhadap suatu isu. Dengan sistem konsensus seperti ini, keuntungan yang diperoleh adalah keputusan yang sama-sama diterima oleh semua anggota. Akan tetapi, pengambilan keputusan melalui konsensus pada sekitar 150 anggota dapat menghadapi kendala, karena beranekaragamnya kepentingan-kepetingan. Walaupun seperti demikian, beberapa perjanjian yang penting dapat dihasilkan melalui sistem konsensus tersebut.²

Level tertinggi dalam pembuatan keputusan di WTO adalah pada pertemuan tingkat tinggi para menteri (*the Ministerial Conference*) yang dilaksanakan paling tidak sekali dalam 2 tahun. Para anggota dapat menciptakan suatu keputusan melalui dewan dan komite. *The Ministerial Conference* dapat mengambil keputusan dalam semua hal yang berada di dalam perjanjian perdagangan internasional.³

Level kedua tertinggi adalah pada Dewan Umum (*General Council*). Dalam pekerjaan keseharian pada tingkat menteri diatur oleh tiga badan, yaitu *the General Council*, *The Dispute Settlement Body*, dan *The Trade Policy Review Body*. Ketiga badan ini berada di bawah kerangka acuan yang berbeda yang bertanggung jawab kepada pertemuan tingkat tinggi para menteri. Apabila terjadi suatu perselisihan atau perbedaan pendapat di antara anggota, maka diperlukan suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan.

¹ World Trade Organization (2009). *Understanding The WTO: Settling Disputes; A Unique Contribution*. 1 Desember 2009. http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/displ_e.htm

² World Trade Organization (2009). *Understanding The WTO: The Organization; Whos WTO is it anyway?*. 4 Desember 2009. http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/orgl_e.htm

³ World Trade Organization (2009). *Ministerial Conferences*. 4 Desember 2009. http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/minist_e.htm

WTO mempunyai mekanisme khusus dalam mencapai kesepakatan bersama jika terjadi perbedaan pendapat di antara anggota. Mekanisme tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan dan diatur sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan yang terdapat pada WTO. Perkiraan jangka waktu untuk periode pencapaian kesepakatan dalam masing-masing tahap tersebut merupakan gambaran umum, sedangkan untuk keputusannya sendiri dapat dilaksanakan secara fleksibel. Sebagai tambahan, negara-negara dapat mencapai suatu kesepakatan di antara mereka sendiri dalam tahap manapun (Total hari dalam tabel juga merupakan perkiraan).⁴

Tabel 3.1.
Perkiraan Jangka Waktu Pencapaian Kesepakatan

Waktu	Kegiatan
60 hari	Konsultasi, mediasi, dll
45 hari	Pembentukan panel beserta penunjukan para panelis
6 bulan	Laporan panel akhir pada kelompok
3 minggu	Laporan panel akhir pada seluruh anggota WTO
60 hari	Persetujuan Laporan oleh <i>DSB (Dispute Settlement Body)</i> (bila tidak ada yang mengajukan banding)
Total = 1 tahun	(tanpa ada permohonan banding)
60-90 hari	Laporan Tinjauan
30 hari	Persetujuan Laporan Tinjauan oleh <i>DSB</i>
Total = 1 tahun 3 bulan	(dengan adanya permohonan banding atau tinjauan)

Sumber: Data diperoleh dari http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/displ_e.htm

Tabel yang tersaji diatas menginformasikan tahapan-tahapan dan perkiraan jangka waktu dalam rangka pencapaian kesepakatan yang ada di dalam WTO.⁵ Melalui mekanisme seperti ini, diharapkan dapat menjadi suatu cara yang ada

⁴ World Trade Organization (2009). *Understanding The WTO: Settling Disputes; The Panel Process*. 1 Desember 2009. http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/displ_e.htm

⁵ Penjelasan secara lengkap tentang tahapan-tahapan, terdapat pada lampiran 3.

pada WTO untuk mencapai suatu kesepakatan bersama apabila terdapat perbedaan pendapat di antara anggota.

3.2. Perjanjian Pertanian Multilateral WTO

Pembicaraan dan perundingan multilateral yang terkait dengan sektor pertanian ditandai dengan *Doha Development Agenda*, akhir tahun 2001. Pada agenda tersebut membicarakan untuk mewujudkan perdagangan internasional produk-produk pertanian secara adil dan berkompetisi secara sempurna. Konferensi Doha dimulai pada November 2001 yang diikuti oleh 121 pemerintah negara-negara anggota, dengan memasukkan perundingan pertanian menjadi bagian dari upaya tunggal yang harus diimplementasi pada tanggal 1 Januari 2005.⁶ Tujuannya adalah untuk mengoreksi dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia. Hal tersebut termuat dalam *Doha Development Agenda* tertanggal 14 November 2001 yang berisikan tentang:

- *market access: substantial reductions;*
- *exports subsidies: reductions of, with a view to phasing out, all forms of these;*
- *domestic support: substantial reductions for supports that distort trade.*⁷

Terdapat puluhan pertemuan yang dilakukan untuk merundingkan permasalahan yang dihadapi. Perundingan tersebut guna mencapai suatu kesepakatan tentang mekanisme dan prosedur agar perdagangan tersebut berjalan secara baik, adil dan kompetitif diantara semua negara anggota, baik negara maju dan negara berkembang. Perundingan tersebut baik bersifat formal, informal sampai pada tingkat konferensi. Melalui kegiatan semacam itu diharapkan dapat mempertemukan kepentingan-kepentingan negara-negara anggota yang dinegosiasikan diantara mereka. Sebagai hasil, diharapkan dapat menghasilkan suatu peraturan baru yang dapat mengatur kegiatan perdagangan pertanian internasional yang adil di antara anggota.

⁶ World Trade Organization. (2009). *Agriculture Work: in the WTO, Current negotiation*. 27 Oktober 2009. http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negoti_e.htm

⁷ World Trade Organization. (2009). *The Doha Declaration Explained*. 27 Oktober 2009. http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dohaexplained_e.htm#agriculture

3.3. Pertemuan dan Perundingan Sektor Pertanian WTO, 2001-2005

Dibawah ini terdapat 60 perundingan, serta proses negosiasi sektor pertanian WTO di antara negara-negara anggota dalam kurun waktu 2000 sampai dengan 2005. Data-data dan informasi yang ditemukan pada tahun 2000 juga dimasukkan ke dalam tabel pertemuan dan perundingan pertanian WTO. Hal ini karena pada tahun tersebut juga berkorelasi terhadap pertemuan-pertemuan yang dimulai pada tahun 2001. Tahun 2000 merupakan awal untuk membuat agenda yang terkait dengan perdagangan internasional sektor pertanian.

Tabel 3.2.
Pertemuan dan Perundingan Sektor Pertanian WTO, 2001-2005

No	Tanggal	Kegiatan	Fenomena
1.	Awal 2000	Mandate: Article 2000	“ <i>Substantial progressive reductions in support and protection resulting in fundamental reform</i> ”. Negara anggota WTO diharuskan bernegosiasi untuk melanjutkan perubahan dari perdagangan pertanian, dengan melakukan pengurangan bantuan dan perlindungan.
2.	23-24 Mar 2000 dan 26-27 Mar 2001	Phase 1: 2000-2001	<ul style="list-style-type: none"> • Penyerahan bersama 45 proposal dan 3 dokumen teknik dari 126 negara sebagai posisi awal • Menentukan 6 perundingan (“<i>Special sessions</i>” of the Agriculture Committee), dilaksanakan pada Maret, Juni, September dan November 2000, dan Februari dan Maret 2001. • Posisi perundingan masih begitu luas.
3.	26-27 Mar 2001	Phase 2: 2001-2002 <i>Stock-Taking Meeting</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan pertemuan Informal (<i>no official record</i>) • Menentukan informal meetings pada Mei, Juli, September dan Desember 2001, dan Februari 2002. Desember 2001 dan Februari 2002 diikuti dengan pertemuan formal. • Perundingan berdasarkan per topik dan penjelasan teknik: untuk memberikan kesempatan anggota merumuskan proposal yang spesifik dan mencapai persetujuan

			<p>secara konsensus dalam perubahan aturan dan komitmen pada pertanian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negara berkembang terus berpartisipasi aktif.
4.	21-23 Mei 2001	<i>Informal Meeting</i>	Administrasi kuota tarif, tarif dan <i>Amber Box</i>
5.	23-25 Jul 2001	<i>Informal Meeting</i>	Subsidi ekspr, kredit ekspor, perusahaan ekspor negara, pajak ekspor dan pembatasan-pembatasan, keamanan pangan, keamanan makanan.
6.	24-26 Sept 2001	<i>Informal Meeting</i>	Pembangunan daerah rural, indikasi geografis, <i>Green Box, Blue Box, Agricultural safeguard</i> .
7.	28 Sept 2001	<i>Formal Meeting</i>	Melanjuti perundingan sebelumnya
8.	9-14 Nov 2001	4 th WTO Ministerial Conference <i>Doha</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundingan baru dengan berbagai topik, termasuk negosiasi yang sudah berjalan di sektor pertanian. • Pertanian sebagai usaha bersama, diimplementasikan 1 Januari 2005. • Deklarasi Doha (<i>Article 20</i>): sistem perdagangan yang adil dan orientasi pasar. • Komitmen terhadap: membuka akses pasar, pengurangan subsidi ekspor dan pengurangan bantuan domestik yang dapat mengganggu perdagangan. • Perlakuan yang berbeda kepada negara berkembang. • “<i>Non-trade concern</i>”. • Modalitas dan komitmen harus ditetapkan paling lambat 31 Maret 2003.
9.	3-4 Des 2001	<i>Informal Meeting</i>	Lingkungan, pemilihan perdagangan, bantuan makanan, informasi dan <i>labelling</i> konsumen, inisiatif sektoral.
10.	7 Des 2001	<i>Formal Meeting</i>	Melanjuti perundingan sebelumnya
11.	4-6 Feb 2002	<i>Informal Meeting</i>	<i>Development box</i> , prosedur komoditas bersama, perlakuan khusus dan berbeda, pengembangan negara kepulauan kecil, dan ‘isu lainnya’.
12.	7 Feb 2002	<i>Formal Meeting</i>	Melanjuti perundingan sebelumnya, sekaligus menutup fase 2 .
13.	26 Mar 2002	<i>Special Session of the Committee on Agriculture</i>	Untuk mempersiapkan <i>overview paper</i> pada perundingan pertanian sebagai dasar yang komprehensif dan substantif pada modalitas, yang akan dilakukan pada <i>Special Session 22-</i>

			24 Jan 2003.
14.	3-4 Juni 2002	<i>“Intersessional” Preparatory Consultations</i>	Mempersiapkan perundingan yang membicarakan ekspor .
15.	17-18 Juni 2002	<i>Informal Meeting “Special Session”</i>	Perundingan membicarakan ekspor : subsidi, kompetisi, pajak dan pembatasan-pembatasan.
16.	20 Juni 2002	<i>Formal Meeting “Special Session”</i>	Melanjutkan perundingan sebelumnya. ekspor .
17.	29-30 Juli 2002	<i>“Intersessional” Preparatory Consultations</i>	Mempersiapkan perundingan yang membicarakan akses pasar .
18.	2-3 Sept 2002	<i>Informal Meeting “Special Session”</i>	Perundingan membicarakan akses pasar .
19.	6 Sept 2002	<i>Formal Meeting “Special Session”</i>	Melanjutkan perundingan sebelumnya. akses pasar .
20.	4-5 Sept 2002	<i>“Intersessional” Preparatory Consultations</i>	Mempersiapkan perundingan yang membicarakan follow up .
21.	23-25 Sept 2002	<i>“Intersessional” Preparatory Consultations dan Informal Meeting “Special Session”</i>	Mempersiapkan perundingan yang membicarakan bantuan domestik . Perundingan membicarakan bantuan domestik .
22.	27 Sept 2002	<i>Formal Meeting “Special Session”</i>	Melanjutkan perundingan sebelumnya. bantuan domestik .
23.	18-20 Nov 2002	<i>Informal Meeting</i>	Melanjutkan perundingan yang membicarakan follow up .
24.	22 Nov 2002	<i>Formal Meeting : Stock-Taking Meeting</i>	Melanjutkan perundingan. Tidak terlihat proposal yang mengindikasikan untuk mengurangi subsidi ekspor, bantuan domestik dan tarif. Salah satu anggota terbesar tidak melakukannya sampai Jan 2003.
25.	18 Des 2002	<i>‘Overview Paper’</i>	Sebagai <i>“Preparations for ‘modalities’”</i> .
26.	22-24 Jan 2003	<i>Comprehensive review based on overview paper (informal / formal)</i>	Draft pertama pada dokumen modalitas
27.	12 Feb 2003	<i>‘First Draft of Modalities for Further Commitments’</i>	Draft fokus kepada perundingan untuk menjabatani perbedaan, agar dapat mencapai persetujuan final. Delegasi terkonsentrasi pada pengeluaran pendapat apa yang mereka inginkan dibandingkan mempertajam perbedaan.

28.	24-28 Feb 2003	<i>Comments on first draft (informal / formal)</i>	Mendiskusikan kembali draft pertama. Lalu melakukan <i>redrafting</i> : draft kedua pada dokumen modalitas.
29.	18 Mar 2003	Perubahan Draft	Revisi draft modalitas, untuk mempersiapkan pertemuan negosiasi pada 25-31 Maret 2002.
30.	25-31 Mar 2003	Pertemuan negosiasi modalitas (<i>final text</i>)	Membicarakan posisi setiap negara anggota, tujuan: konsensus dalam draft, melalui perubahan-perubahan.
31.	31 Mar 2003	'Modalities' Deadline	Negara anggota gagal untuk menyetujui 'modalitas' dan mengalihkan kepada 'kerangka' modalitas, yang akhirnya disepakati 1 Agustus 2004, melalui "persiapan untuk modalitas" (Maret 2002-Juli 2003), " <i>Cancun</i> dan fase kerangka" (Agustus 2003-Agustus 2004), dan "fase modalitas" (September 2004 -).
32.	26-27 Jun 2003	Sesi Negosiasi (<i>informal meeting</i>)	Melanjutkan konsesus yang lama tidak dicapai pada isu utama pertanian, karena negosiator memiliki kekurangannya pada keputusan pemerintah pada level politik.
33.	1 Jul 2003	<i>Formal meeting</i>	Melanjutkan perundingan dalam rangka mempersiapkan <i>Cancun Fifth Meeting of the Ministerial Conference</i> .
34.	7 Juli 2003	Laporan kepada Komite Negosiasi Perdagangan	Bertujuan untuk membantu peserta pada diskusi sektor pertanian mereka dalam proses persiapan untuk <i>Fifth Meeting of the Ministerial Conference</i> .
35.	16-17 Jul 2003	<i>Informal meeting</i>	Melanjutkan perundingan
36.	18 Jul 2003	<i>Formal meeting</i>	Melanjutkan perundingan dan persiapan
37.	10-14 Sept 2003	<i>5thWTO Ministerial Conference Cancun</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Negara anggota memulai perundingan dengan tidak membawa posisi awal mereka. • Beberapa tahapan cukup signifikan diantara posisi mereka, tetapi tidak cukup memuaskan. Perbedaan mulai terfokuskan, tetapi konsensus tetap diragukan. • UE dan AS mulai menunjukkan kepemimpinannya, dengan mengalihkan kepada 'kerangka' modalitas yang dapat memfokuskan kepada pengerucutan isu utama. • Melalui internal diskusi tersebut, UE mulai mengubah CAP. • Tetap memiliki masalah pada draft yang baru (investasi, kebijakan kompetisi, transparansi dalam pengadaan pemerintah

			<p>dan fasilitasi perdagangan), “<i>Singapore Issues</i>” = “<i>Deadlock</i>”.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dengan dimulainya 2004, pendekatan pertama ditujukan kepada kerangka, dan kemudian untuk menyelesaikan modalitas.
38.	22-23 Mar 2004	“ <i>Agriculture Week</i> ”	<p>Menjalankan pendekatan yang baru untuk bertemu dan bernegosiasi di antara mereka. Bertujuan untuk transisi posisi awal pada fase sebelumnya dan diterjemahkan pada proposal negosiasi ke fase ‘penyelesaian masalah’.</p> <p>52 formal proposal negosiasi, 21 latarbelakang berkas sekretariat dan 99 berkas tidak resmi dan beberapa ‘kerangka’ draft diterima WTO.</p>
39.	24 Mar 2004	“ <i>Agriculture Week</i> ”	Pertemuan transparansi.
40.	26 Mar 2004	“ <i>Agriculture Week</i> ”	Delegasi melaporkan kembali kepada semua anggota tentang konsultasi mereka.
41.	27 Mar 2004	Pertemuan antara pada anggota Grup	The Cairns Group, G-10, G-20 (kelompok negara berkembang), G-33 (dipimpin oleh Indonesia dan mengajukan untuk adanya perlakuan khusus untuk negara berkembang), the African Group, the African-Caribbean-Pacific group, atau individu member (US, UE, Jepang).
42.	28 Mar 2004	Sesi Negosiasi	<ul style="list-style-type: none"> Tekanan negosiasi mengalami perubahan, dan untuk mendengarkan kepentingan dari masing-masing anggota, dengan bernegosiasi di antara mereka. Tapi, diskusi tidak terlihat menghasilkan ‘penyelesaian masalah’. Delegasi menekankan pada proses mendengar kepentingan-kepentingan saja. Secara teknis, mengalami kesulitan pada akses pasar dari 3 pilar deklarasi doha. Delegasi setuju mencoba menyusun ‘kerangka’ (tanpa angka) pada akhir Juli, dan 4 pertemuan pada April, Juni (2x) dan Juli.
43.	20-23 Apr 2004	Sesi Negosiasi	Pertemuan untuk bertemu dan bernegosiasi di antara anggota, dengan mencoba kompromi 5 negara (Australia, Brazil, UE, India, AS) dan anggota yang lainnya.
44.	23-25 Jun 2004	Sesi Negosiasi	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan untuk bertemu dan bernegosiasi di antara anggota, dengan mencoba kompromi 5 negara (Australia, Brazil, UE, India, AS) dan anggota yang lainnya,

			<p>dengan topik pembicaraan utama tentang akses pasar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progres pada sistem paralel pada subsidi ekspor dengan kredit subsidi ekspor, subsidi bantuan makanan dan negara eksporter.
45.	16 Jul 2004	<i>Informal Meeting of Heads of Delegations : First Draft of post-Cancun decision for the General Council</i>	Pengumpulan dan pembahasan draft pertama setelah pertemuan Cancun
46.	19 Jul 2004	<i>Draft decision for General Council</i>	Meminta para anggota untuk berusaha dalam 2 minggu ke depan untuk menyetujui <i>Doha Development Agenda</i>
47.	20 Jul 2004	<i>Informal Meeting of Heads of Delegations</i>	Meminta para anggota untuk lebih konsentrasi di draft pertama dan berkomitmen pada fase negosiasi berikutnya, mengacu kepada <i>deadline</i> 30 Juli.
48.	23 Jul 2004	<i>Informal Meeting of Heads of Delegations : Meeting Summary</i>	Melakukan konsultasi yang transparan dan laporan progress yang sedang berjalan dalam perundingan, dan beberapa perubahan yang dinegosiasikan, serta pemenuhan <i>deadline</i> .
49.	28 Jul 2004	Pertemuan Konsultasi lanjutan: <i>Meeting Summary</i>	Sebanyak 119 negara anggota tidak berpartisipasi dalam diskusi dan konsultasi. Berhubungan dengan kepentingan mereka tidak diikutsertakan.
50.	29 Jul 2004	<i>Progress on Agriculture and Meeting Summary</i>	5 anggota kunci utama (Australia, Brazil, UE, India dan AS) dalam pertanian diterima WTO dan melakukan perundingan penting. Kerangka pertanian WTO dapat memungkinkan jika mendapat dukungan dari seluruh anggota.
51.	30 Jul 2004	<i>Informal Meeting of Heads of Delegations : Second Draft of Post-Cancun decision for the General Council</i>	Pengumpulan dan pembahasan draft kedua setelah pertemuan Cancun. Pada draft kedua ini merundingkan perlunya perubahan sebagai ketidakadilan antara negara maju dan berkembang.
52.	31 Jul 2004	<i>Meeting Summary</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi dan membuat draft dan memperbarui draft untuk dikompromikan. • Gagal mencapai <i>deadline</i> draft 1& 2.

53.	1 Agust 2004	<i>Meeting post-deadline</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri dan duta besar menanggalkan tujuan-tujuannya. Hanya draft ketiga saja yang mencapai konsensus (dokumen WT/L/579). • Framework Agreed
54.	6-8 Okt 2004	<i>The post-framework 'modalities' phase</i>	Pembacaan pertama: <i>Green Box</i> , bantuan domestik, kredit/gransi/asuransi ekspor, perusahaan ekspor negara, bantuan makanan, <i>ad valorem equivalents of specific duties</i> , mekanisme perlindungan khusus bagi negara berkembang.
55.	15-19 Nov 2004	<i>The post-framework 'modalities' phase</i>	Pembacaan pertama: administrasi kuota tarif; kuota tarif dasar untuk ekspansi, produk tropis dan narkotika; metodologi untuk produk khusus; periode untuk dukungan domestik. Lebih detail: <i>ad valorem equivalents of specific duties</i> ; perusahaan ekspor negara; bantuan makanan; kredit/garansi/ asuransi ekspor; <i>Green Box</i> bantuan domestik. Konsultasi kelompok spesialis: <i>ad valorem equivalents of specific duties</i> .
56.	27-29 Jul 2005	<i>General Council Meeting</i>	Tujuan adalah untuk mempersiapkan modalitas untuk mendorong konferensi Hongkong Desember 2005.
57.	14 Des 2005	6 th WTO Ministerial Conference <i>Hongkong</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan kembali perundingan yang membicarakan formula pengurangan tarif dan kemudahannya. • Penyetujuan <i>deadline</i> subsidi ekspor tidak disetujui sebelum isu kredit ekspor, sedangkan <i>food aid</i> dan perusahaan ekspor negara dapat disetujui.
58.	16 Des 2005	6 th WTO Ministerial Conference <i>Hongkong</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus kepada kompetisi ekspor dan <i>deadline</i> pada kebijakan subsidi. • Perbedaan pendapat dalam pengurangan kebijakan tarif di antara negara. • Sangat dibutuhkan usaha yang lebih keras lagi dari negara anggota untuk kemajuan perundingan.
59.	17 Des 2005	6 th WTO Ministerial Conference <i>Hongkong</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemfokusan pembicaraan pertanian. • Pembuatan modalitas dari masing-masing anggota dalam waktu dekat.
60.	18 Des 2005	6 th WTO Ministerial	Delegasi menyetujui perjanjian bahwa subsidi ekspor pertanian akan dihapuskan pada tahun 2013 , walaupun sebagian dari yang lain

		<i>Conference Hongkong: Closing</i>	menghendaki lebih cepat dari tahun itu.
--	--	---	---

Sumber: Data diolah kembali dari website resmi *World Trade Organization*

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 3.2 diatas, dapat terlihat bahwa telah banyak pertemuan dan perundingan yang difasilitasi oleh WTO untuk membicarakan isu pertanian. Pembicaraan dari setiap pertemuan berbeda-beda dan memiliki cakupan yang cukup luas, yang dimulai dari pembukaan perundingan, penyerahan proposal, diskusi, revisi-revisi, *deadlock*, sampai penundaan implementasi penghapusan sistem subsidi pada sektor pertanian.

Tercatat perundingan pertama diadakan pada awal tahun 2000 dengan ditandai dengan dimulainya pembahasan tentang sektor pertanian yang bertujuan untuk menegosiasikan perdagangan pertanian. Sepanjang tahun 2000-2001 (*Phase 1*) pertemuan WTO hanya mengenai tentang tujuan dilakukan perubahan kebijakan pertanian negara anggota WTO dan penyerahan proposal sebagai posisi masing-masing negara pada Maret 2000 dan Maret 2001.

Masuk pada *Phase 2* (Maret 2001), pertemuan difokuskan kepada pengumpulan data-data dan juga penentuan agenda ke depan untuk melanjutkan wacana bersama ini. Beberapa pertemuan informal dan formal selama tahun 2001 dimulai untuk pertama kali membicarakan beberapa hal, seperti tarif, kuota tarif, *Amber Box*, subsidi ekspor, kredit ekspor, perusahaan ekspor negara, pajak ekspor, hambatan-hambatan, ketersediaan pangan dan bantuan. Disamping itu, dimasukkan juga agenda untuk membicarakan pembangunan pedesaan, indikasi geografis, *Green Box*, *Blue Box*, *Agricultural safeguard*. Semua pembahasan tersebut dibicarakan pada pertemuan tingkat tinggi 4th *Ministerial Conference* di Doha pada November 2001, yang kemudian terciptanya Deklarasi Doha. Pada konferensi ini, disetujui untuk mengimplementasikan kerjasama pertanian sebagai usaha bersama paling lambat pada 1 Januari 2005, dengan pengumpulan modalitas dan komitmen paling lambat 31 Maret 2003.

Memasuki tahun 2002, pertemuan dilanjutkan dengan berbagai macam pertemuan informal, formal dan pertemuan khusus untuk membahas masing-

masing proposal yang menentukan posisi negara anggota pada isu ini. Sepanjang tahun tersebut, perundingan membicarakan pada 3 hal utama, yaitu subsidi ekspor, akses pasar dan bantuan atau dukungan domestik. Para negara anggota merundingkan kepentingannya masing-masing untuk menentukan modalitas agar mencapai kesepakatan bersama. Namun, sepanjang perkembangannya, hingga November 2002, pada pertemuan formal, tidak terlihat peroposal yang menunjukkan inisiatif untuk mengurangi subsidi ekspor, bantuan domestik dan penurunan tarif, terutama dari negara-negara besar, termasuk di dalamnya UE. Padahal, seharusnya pada bulan Desember 2002, setiap negara anggota harus sudah dapat merumuskan modalitas masing-masing.

Review secara komprehensif pada proposal pertemuan dilakukan pada tanggal 22-24 Januari 2003 sampai Februari 2003 adalah sebagai pembuatan draft pertama untuk dokumen modalitas dan penyampaian pendapat dari masing-masing anggota. Draft ini adalah penting untuk menentukan modalitas sebagai usaha bersama. Selama berjalannya penyusunan draft pertama ini terdapat revisi-revisi yang dilakukan dengan mempertimbangkan posisi setiap negara anggota. Akan tetapi, negara anggota gagal untuk memenuhi dan menyetujui modalitas pada tanggal 31 Maret 2003, seperti yang sudah disepakati pada Agenda Doha.

Polemik terjadi dalam beberapa waktu tersebut, dimana negara-negara anggota tetap mempertahankan kepentingannya dan tidak mencapai kesepakatan bersama dan tidak berhasil mencapai konsensus. Dengan demikian, diatur kembali untuk menyepakati tanggal baru yaitu pada 1 Agustus 2004, dengan menentukan 'kerangka modalitas'.

Sementara itu, perundingan terus dilakukan oleh anggota pada bulan Juli 2003 sebagai persiapan untuk menghadapi *Cancun 5th Meeting of the Ministerial Conference* pada 10-14 September 2003. Di dalam konferensi tersebut perundingan terfokus kepada perubahan yang tidak signifikan dan tidak memuaskan. Peran AS dan UE (negara-negara UE diwakili oleh Komisi Eropa disetiap perundingan internasional) sebagai negara besar mulai terlihat dengan mengalihkan pembentukan modalitas kepada pembuatan kerangka terlebih dahulu yang memfokuskan pada pengerucutan isu. Di titik ini lah, Komisi Eropa mulai

melakukan perubahan pada CAP pada batasan tertentu. Perubahan-perubahan dan pengurangan faktor-faktor penghambat perdagangan pada dasarnya telah berlaku selama kurun waktu tersebut. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak cukup signifikan untuk menghilangkan gangguan perdagangan internasional.

Tahun berikutnya, pada akhir Maret 2004 terdapat “*Agriculture Week*” yang menjalankan pendekatan yang baru untuk bertemu dan bernegosiasi di antara mereka. Bertujuan untuk transisi posisi awal pada fase sebelumnya dan diterjemahkan pada proposal negosiasi ke fase ‘penyelesaian masalah’. Terdapat 52 formal proposal negosiasi, 21 latarbelakang berkas sekretariat dan 99 berkas tidak resmi dan beberapa ‘kerangka’ draft diterima WTO. Namun, langkah ini pun tidak menemukan titik terang untuk dapat menyelesaikan masalah, sehingga, anggota setuju untuk mencoba menyusun kembali pada akhir Juli, dan 4 pertemuan pada April, Juni (2x) dan Juli.

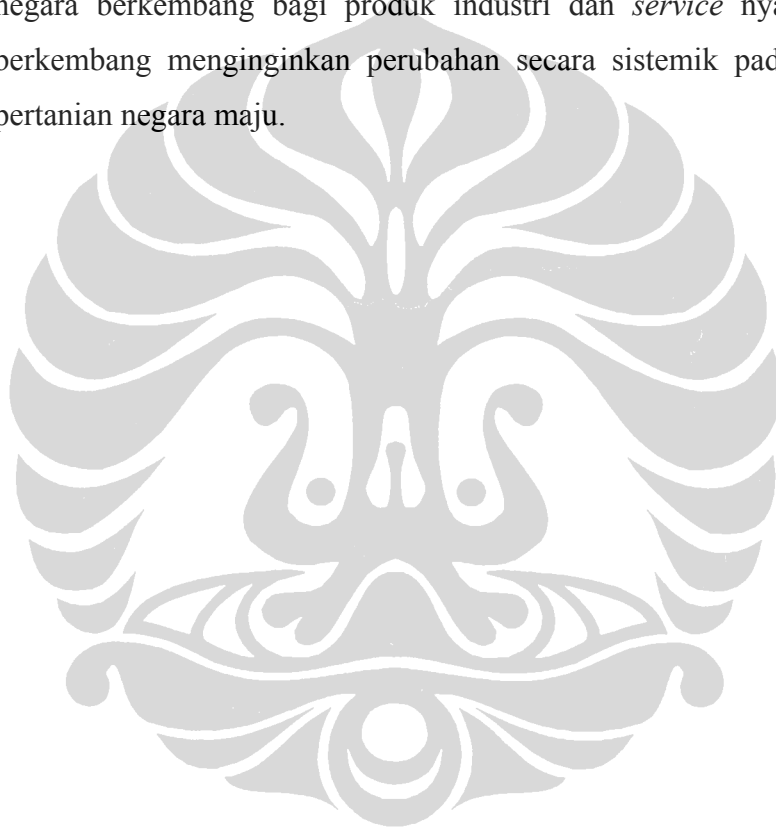
Agenda pertemuan pada bulan Juli difokuskan pada pengumpulan draft pertama komitmen pertama pada tanggal 30. Namun, terdapat perbedaan pendapat dan tidak terfasilitasinya kepentingan anggota. Pada pertemuan konsultasi tanggal 18 Juli 2004, sebanyak 119 negara anggota tidak berpartisipasi dalam diskusi dan konsultasi. Berhubungan dengan kepentingan mereka tidak diikutsertakan. Hingga sampai batas waktu, draft pertama dan kedua juga belum rampung untuk di serahkan kepada WTO. Hanya draft ketiga saja yang mencapai konsensus yaitu pada tanggal 1 Agustus 2004.

Pada bulan Oktober 2004, dimulai pembacaan dan pembahasan tentang *Green Box*, bantuan domestik, kredit ekspor, *food aid*, *ad valorem equivalents of specific duties*, mekanisme perlindungan khusus bagi negara berkembang. Sedangkan pada November 2004 merupakan pembacaan pertama pada administrasi kuota tarif; kuota tarif dasar untuk ekspansi, produk tropis dan narkotika; metodologi untuk prodk khusus; periode untuk dukungan domestik. Isu-isu tersebut yang akan dibahas pada 6th WTO *Ministerial Conference* Hongkong.

Dalam perkembangannya, pada 6th WTO *Ministerial Conference* Hongkong, WTO menghadapi permasalahannya yang sama seperti sebelumnya.

Perbedaan pendapat masih menjadi alasan utama terhadap terjadinya *deadlock* pada pertemuan WTO tersebut. Pada akhir penutupan, disetujui perjanjian bahwa subsidi ekspor pertanian akan dihapuskan pada tahun 2013, walaupun sebagian dari yang lain menghendaki lebih cepat dari tahun itu.

Masing-masing negara anggota WTO tetap mempertahankan kepentingan pertanian domestiknya dibandingkan untuk melakukan kompromi secara luas terhadap anggota yang lain. Kepercayaan di antara mereka belum tumbuh. Di satu sisi, negara maju menginginkan akses pasar yang sebesar-besarnya terhadap negara berkembang bagi produk industri dan *service* nya, sedangkan negara berkembang menginginkan perubahan secara sistemik pada mekanisme sektor pertanian negara maju.



BAB 4

CAP UNI EROPA DALAM *WORLD TRADE ORGANIZATION*

Perundingan mengenai sektor pertanian pada tingkat WTO sudah dimulai sejak Putaran Uruguay tahun 1995. Perundingan tersebut memiliki agenda tentang pembukaan pasar bagi setiap negara, penurunan tingkat tarif perdagangan, pengurangan bantuan domestik dan bantuan ekspor bagi produk-produk pertanian. Para anggota WTO melakukan pertemuan kembali di Doha, Qatar, yang menyepakati *Doha Development Agenda* pada November 2001. *Doha Development Agenda* bertujuan untuk membuka negosiasi pasar di bidang pertanian, barang-barang manufaktur dan jasa.¹ Pertemuan yang dihadiri oleh 121 perwakilan negara tersebut juga bertujuan untuk meminimalkan hambatan-hambatan perdagangan dunia. Dengan demikian, diharapkan akan menciptakan peningkatan perdagangan internasional antar negara dan antar regional, yang dalam hal ini pada produk-produk pertanian pada khususnya.

Putaran Doha juga mengagendakan perundingan tentang pembuatan aturan-aturan perdagangan yang lebih adil terhadap negara-negara berkembang. Negara berkembang merupakan bagian dari komunitas internasional yang juga dapat melakukan kegiatan perekonomian dan berhak mendapatkan manfaat dari perdagangan internasional. Oleh karena itu, dalam perdagangan internasional yang dimaksud, diperlukan suatu aturan-aturan yang mengikat dan adil yang tidak merugikan negara berkembang di satu pihak, dalam hal ini terutama di sektor pertanian.

UE memiliki *Common Agricultural Policy* (CAP) yang pada dasarnya merupakan suatu kebijakan subsidi pertanian yang sistematis hingga saat ini. UE mengalokasikan dana untuk CAP sekitar 43 juta euro setiap tahunnya.² UE mengalokasikan hampir sekitar 44% dari anggaran pada tahun 2005 untuk menjamin harga minimum yang melindungi sektor pertanian. UE juga

¹ BBCNews (2009). *Timeline: World Trade Organization*. 7 Maret 2009.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/2430089.stm

² BBCNews (2008). *Q&A: Common Agricultural Policy*. 10 Mei 2009.
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4407792.stm>

memberlakukan tarif dan kuota terhadap barang-barang impor tertentu dari luar Eropa. Tujuannya adalah menjamin produksi pangan yang stabil dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani di negara-negara Eropa.³

Motif perlindungan pada sektor pertanian tersebut tersirat dari artikel 33 (39) Traktat Komunitas Ekonomi Eropa (Traktat Roma 1957).

*Article 33 (39) of the EC Treaty (Treaty of Rome 1957) sets out the **internal objectives** of the CAP: to increase agricultural productivity by promoting technical progress and ensuring the optimum use of the factors of production, in particular labour; to ensure a fair standard of living for farmers; to stabilise markets; to assure the availability of supplies; to ensure reasonable prices for consumers.*⁴

Mengacu pada ketentuan yang termuat dalam artikel 33 (39) tersebut, CAP memiliki tujuan untuk meningkatkan produktifitas pertanian. Hal tersebut dapat dicapai dengan memberikan bantuan teknik dan menjamin secara maksimal penggunaan faktor-faktor produksi, yaitu terutama tenaga kerja; menjamin standar hidup yang layak bagi petani; menciptakan stabilisasi pasar; menjamin ketersediaan produk pertanian; dan menjamin harga yang terjangkau bagi konsumen.

Lima tujuan besar tersebut yang termuat dalam artikel 33 (39) Komisi Eropa memperlihatkan suatu kesenjangan dengan wacana pasar bebas yang berlaku dalam WTO. Bantuan keuangan seperti subsidi bagi faktor produksi maupun bantuan ekspor tersebut merupakan kebijakan proteksi suatu negara. Padahal, bantuan yang berbentuk seperti subsidi dilarang dalam pengimplementasian pasar bebas. Melalui kasus ini dapat terlihat bahwa CAP sangat menguntungkan produsen pertanian negara-negara anggota UE dengan melindungi petani-petani domestik Eropa dan mendiskriminasikan produk pertanian negara-negara berkembang (negara bukan anggota UE). Hal ini akhirnya menyebabkan produk pertanian negara-negara berkembang tidak dapat

³ Bretherton, Charlotte., & Vogler, John. (1999). *The European Union as a Global Actor*. New York: Routledge. Hal. 53.

⁴ European Parliament (2001). *European Parliament Fact Sheets: The Treaty of Rome and Green Europe*. 26 April 2009. http://www.europarl.europa.eu/factsheets/4_1_1_en.htm

berkompetisi, karena harganya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan produk negara anggota UE, yaitu dengan diberlakukannya tarif impor dan pelaksanaan subsidi ekspor.

Disamping itu, dengan adanya pemberian bantuan subsidi, menimbulkan beberapa permasalahan di WTO, seperti hasil produksi pertanian negara UE selalu mengalami kelebihan atau *surplus*. Berlebihnya hasil produksi tersebut menyebabkan terjadinya *dumping* komoditas pertanian, dengan 'dibuang' (*dumping*) ke negara lain.⁵ Sehingga, kasus tersebut sangat mengganggu stabilitas perdagangan internasional terutama di negara-negara penerima produk *dumping* tersebut. Jadi, tidak mengherankan jika harga jualnya akan jauh lebih rendah di pasaran internasional.

4.1. Kontroversi Terhadap CAP

Berdasarkan data-data yang telah terangkum sebelumnya, anggota WTO setuju untuk memulai perundingan perdagangan pertanian internasional. Pembicaraan negosiasi guna melanjutkan proses reformasi perdagangan pertanian, yaitu pada akhir 1999 yang dimulai pada awal tahun 2000 di bawah mandat Pasal 20 dari Perjanjian Pertanian. Berikut mandat Pasal 20 tentang perjanjian pertanian:

THE ORIGINAL MANDATE

Article 20

of the Agriculture Agreement

Recognizing that the long-term objective of substantial progressive reductions in support and protection resulting in fundamental reform is an ongoing process, Members agree that negotiations for continuing the process will be initiated one year before the end of the implementation period, taking into account:

- (a) the experience to that date from implementing the reduction commitments;*
- (b) the effects of the reduction commitments on world trade in agriculture;*
- (c) non-trade concerns, special and differential treatment to developing-country Members, and the objective to establish a fair and market-oriented agricultural trading system, and the other objectives and concerns mentioned in the preamble to this Agreement; and*

⁵ Wiarda, Howard. J. (2001). *European Politics in the Age of Globalization*. Orlando, Florida: Harcourt College Publisher.

(d) *what further commitments are necessary to achieve the above mentioned long-term objectives.*⁶

Mandat Pasal 20 tersebut merupakan komitmen bersama untuk menjalankan perjanjian dalam bidang pertanian, dengan menghasilkan perubahan terhadap pengurangan subsidi dan proteksi sampai dengan setahun sebelum waktu pengimplementasian. Perjanjian tersebut memuat tujuan jangka panjang bersama untuk melakukan pengurangan bantuan dan proteksi dengan melaksanakan komitmen; perlakuan khusus dan yang berbeda untuk negara berkembang, dan tujuan untuk membangun pasar yang adil dan berorientasi pada sistem perdagangan bebas pertanian; dan komitmen ke depan yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Konferensi Doha dimulai pada November 2001 yang diikuti oleh 121 pemerintah negara-negara anggota, dengan memasukkan perundingan pertanian menjadi bagian dari upaya tunggal yang harus diimplementasi pada tanggal 1 Januari 2005.⁷ Tujuannya adalah untuk mengoreksi dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia. Hal tersebut termuat dalam deklarasi Doha tertanggal 14 November 2001,⁸ seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Instrumen-instrumen kebijakan pertanian Eropa bertentangan dengan komitmen dan ketentuan di tingkat WTO. Jika dilihat dari sisi UE, pada dasarnya CAP merupakan kebijakan pertanian Eropa yang bertujuan untuk memberikan bantuan agar dapat meningkatkan tingkat produksi. Bantuan tersebut adalah atas dasar peningkatan produktifitas pertanian dan pemulihan perekonomian Eropa serta memberdayakan masyarakat pertanian yang berada di pedesaan. Program modernisasi pertanian merupakan salah satu tujuan utama CAP juga. Akan tetapi, selama berjalannya, CAP dinilai oleh negara-negara berkembang tidak sejalan

⁶ World Trade Organization (2009). *Agriculture Work: in the WTO, Current negotiation*. 27 Oktober 2009. http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negoti_e.htm

⁷ *Ibid.*

⁸ World Trade Organization (2009). *The Doha Declaration Explained*. 27 Oktober 2009. http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dohaexplained_e.htm#agriculture

dengan paham pasar bebas dalam WTO dan dapat merugikan mereka. Hal tersebut dapat memungkinkan terjadi karena CAP merupakan mekanisme pertanian UE sebagai bantuan keuangan bagi kegiatan pertanian Eropa. Oleh sebab itu produk-produk negara berkembang tidak mampu bersaing secara adil dengan produk-produk UE.

Fenomena tersebut terlihat melalui beberapa poin dari lima tujuan besar yang termuat dalam artikel 33 (39) Komisi Eropa yang dapat dilihat bahwa tidak sesuai dengan wacana pasar bebas yang berlaku dalam WTO. Perdagangan pasar bebas menentang adanya kebijakan proteksi yang ditandai dengan adanya kebijakan tarif impor dan bantuan keuangan pada faktor produksi serta subsidi ekspor dalam UE. Melalui kasus ini dapat terlihat bahwa CAP sangat menguntungkan produsen pertanian negara-negara anggota UE dengan diberikannya bantuan finansial kepada produksi, dan mendiskriminasikan produk pertanian negara-negara berkembang (negara bukan anggota UE). Hal ini, kemudian, menciptakan mekanisme perdagangan internasional yang tidak adil. Produk pertanian negara-negara berkembang tidak dapat berkompetisi, karena harganya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan produk negara anggota UE.

Protes terbesar, atas pelaksanaan CAP tersebut, datang dari negara-negara berkembang yang berhubungan langsung dalam perdagangan. Perdagangan internasional pertanian sudah menjadi subjek yang dinegosiasikan pada tingkat WTO sejak tahun 2001.⁹ Dengan tetap diberlakukannya kebijakan pertanian Eropa tersebut membuat perdagangan internasional tingkat WTO tidak berjalan adil dan tidak sesuai dengan peraturan didalamnya, sehingga menyebabkan implikasi yang tidak baik. Produksi yang berlebihan sehingga UE dapat 'membuang' kelebihan produksinya dengan harga yang murah tersebut ke negara-negara lain adalah salah satu *excess* dari CAP yang sangat merusak harga pasar internasional. Disamping itu pemberlakuan impor tarif dan tetap berjalannya bantuan subsidi ekspor juga menuai protes dari negara anggota WTO terhadap UE, dan meminta UE segera mengubah mekanisme CAP.

⁹ *Ibid.*

Berikut adalah isu-isu yang muncul akibat diberlakukannya CAP dalam perdagangan tingkat WTO, yang merugikan negara-negara lain:

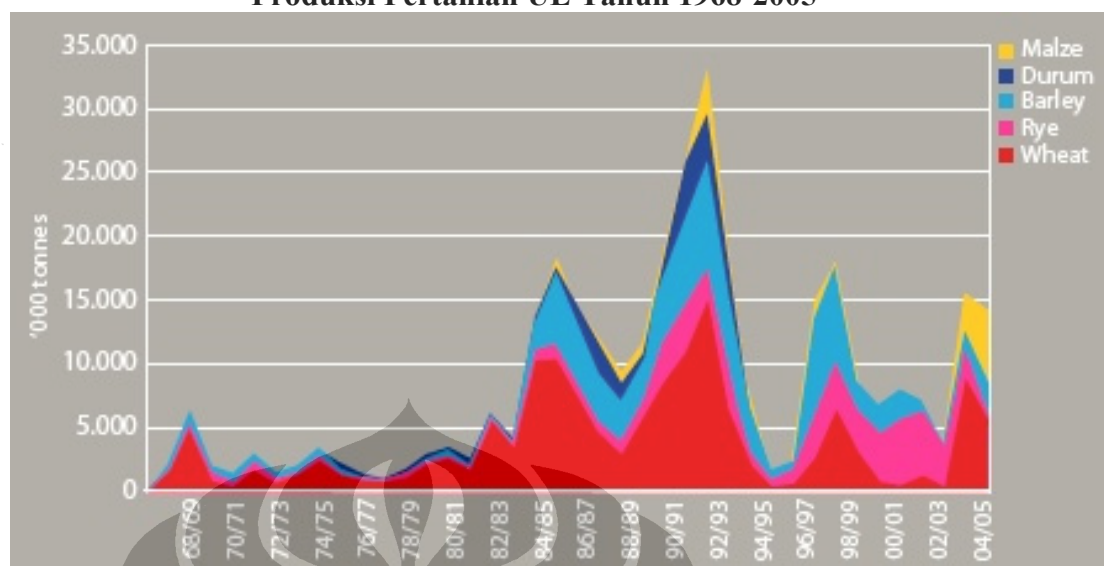
4.1.1. *Dumping*

Pemberlakuan kebijakan pertanian Eropa tersebut mendorong kegiatan produksi pertanian terus meningkat. Hal ini memang baik untuk melakukan pengamanan ketersediaan pangan di Eropa pasca PD II, agar masyarakat Eropa terjamin akan bahan-bahan makanan. Akan tetapi, peningkatan produktifitas barang-barang pertanian tersebut jika tidak dapat diawasi dengan baik, maka akan memberikan dampak yang buruk, seperti produksi yang berlebihan (*over-production*) pada tahun 1970-an. *Over-production* yang terjadi dalam kegiatan perekonomian Eropa tersebut juga mempengaruhi kegiatan perekonomian internasional dengan terjadinya "*dumping*", khususnya perdagangan dibidang pertanian. Dengan demikian, produk-produk pertanian yang tersebar ke berbagai negara dapat dijual dengan harga yang rendah.¹⁰ Sudah tentu hal ini menuai protes dari negara-negara lain, karena produk-produk mereka tidak dapat bersaing dengan produk Eropa sebagai hasil dari kelebihan produksi yang dapat dijual dengan harga yang murah.

Grafik dibawah ini menunjukkan produksi yang berlebihan yang merupakan dampak buruk dari CAP:

¹⁰ Balaam, N.David., & Veseth, Michael. (2005). *Introduction to International Political Economy*. New Jersey: Pearson and Prentice Hall. Hal. 251.

Grafik 4.1.
Produksi Pertanian UE Tahun 1968-2005



Sumber: European Commission Agriculture and Rural Development

Grafik 4.1, menggambarkan bahwa insentif yang diberikan oleh CAP mendorong kepada peningkatan produksi yang dimulai pada tahun 1960-an dan tahun-tahun berikutnya.¹¹ Namun, peningkatan produksi yang besar-besaran terjadi antara tahun 1984 sampai dengan tahun 1993, yang kemudian menyebabkan protes diantara negara-negara lain karena dampak buruk terhadap petani di negara tersebut, di mana pasar domestiknya dipenuhi oleh produk pertanian yang merupakan *dumping* dari Eropa dengan harga yang sangat murah.¹² Peningkatan produksi yang berlebihan ini dikarenakan pemberlakuan CAP yang tidak terkontrol.¹³

¹¹ European Commission Agriculture and Rural Development (nd). The Common Agricultural Policy Explained. *European Commission Directorate-General Agriculture and Rural Development*. 23 Oktober 2009. http://ec.europa.eu/agriculture/publi/capexplained/cap_en.pdf. Hal 9.

¹² EurActiv.com (2006). *Pros and Cons Reviving Doha*. 27 oktober 2009. <http://www.euractiv.com/en/trade/pros-cons-reviving-doha/article-158665>

¹³ Pidato **Mariann Fischer Boel**, *Member of the European Commission responsible for Agriculture and Rural Development*, pada *Time for Transparency on CAP Payments*, Europa (2006). Press Releases RAPID. 27 Oktober 2009. <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/459&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en>

4.1.2. Pemberlakuan Tarif Impor

Anggota WTO juga memprotes dengan adanya pemberlakuan **tarif impor** untuk komoditas-komoditas pertanian dari negara luar Eropa dan penerapan **subsidi ekspor** sebagai mekanisme bantuan terhadap petani Eropa.

Perundingan Doha awalnya dimulai pada tahun 2001 dengan tujuan menyelesaikan ketidaksetaraan sehingga negara berkembang dapat mendapatkan keuntungan lebih dari perdagangan bebas. Namun, perundingan telah berulang kali buntu karena negara-negara maju tidak mencapai kesepakatan dengan negara-negara berkembang tentang pembukaan akses pasar. Amerika Serikat dan UE menginginkan akses lebih besar untuk menyediakan layanan (*service sector*) untuk tumbuh dengan cepat negara-negara berkembang, termasuk Cina dan India. Sementara itu, negara-negara berkembang ingin akses lebih besar untuk produk pertanian mereka di Eropa dan Amerika Serikat, tetapi tidak dikabulkan.¹⁴

Selama ini negara maju sudah berkuasa dalam teknologi dan produk jasa (keuangan dan perbankan), kini pun mereka ingin membanjiri negara berkembang dengan produk-produk pertanian. Di mana kesempatan negara berkembang menjual produknya, khususnya sektor pertanian, termasuk kapas Afrika yang unggul, tetapi terhambat memasuki pasar negara maju. Negara berkembang dituntut menerima impor produk pertanian negara maju. Hal ini disetujui dengan batasan. Jika impor melebihi 115 persen dari basis volume impor, negara berkembang bisa mengenakan tarif impor tambahan. Jika pembatasan dilakukan setelah impor menjadi 140 persen, para petani di negara berkembang sudah keburu terpuruk.¹⁵

Pemberlakuan tarif impor bagi barang-barang pertanian yang masuk ke Eropa merupakan salah satu hal yang menjadi pembicaraan sengit dalam berbagai perundingan tingkat WTO, yang kemudian mendorong kepada perdagangan yang tidak adil. Komoditas negara lain yang masuk ke Eropa sudah tentu memiliki harga yang lebih tinggi dari komoditas pertanian yang dimiliki oleh negara-negara

¹⁴ BBC News (2008). *World Trade Talks end in Collapse*. 27 Oktober 2009.
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7531099.stm>

¹⁵ Kompas.com (2008). *Daud pun Mengalahkan Goliat di WTO*. 28 Oktober 2009.
<http://www.kompas.com/read/xml/2008/08/14/23570524/daud.pun.mengalahkan.goliat.di.wto>

UE, sehingga tidak dapat bersaing dan tidak mendapat pasar di wilayah Eropa. Negara-negara yang memiliki hubungan dagang dengan Eropa meminta UE untuk mengikuti peraturan yang berlaku dalam WTO agar tercipta praktek perdagangan internasional yang adil.

Disamping itu keberatan akan pemberlakuan tarif impor yang tinggi juga datang dari internal Eropa. Pada dasarnya objektif dari CAP tersebut dapat tercapai dengan ditandai adanya peningkatan produktifitas komoditas pertanian, pencapaian standar hidup para petani, stabilitas pasar dan keamanan pangan. Akan tetapi, dengan diberlakukan kebijakan CAP, konsumen negara-negara UE merasa dirugikan dan terbebaskan dengan harga yang cukup tinggi yang ditargetkan oleh pemerintah, dan harga yang tinggi pula pada barang-barang impor. Harga pasar tidak dapat bersaing dengan menawarkan harga yang kompetitif dan murah untuk para konsumen karena adanya turut serta pemerintah dalam menentukan harga barang di pasar. Disamping itu, juga terdapat intervensi pemerintah dalam pengaturan barang-barang impor.¹⁶ Sehingga, konsumen tidak memiliki pilihan untuk mendapatkan barang-barang yang murah di pasar.

4.1.3. Pelaksanaan Subsidi Ekspor

Penerapan bantuan subsidi ekspor juga merupakan satu hal yang menjadi kontroversi di dunia internasional. Banyak negara-negara anggota WTO membicarakan kebijakan subsidi ekspor tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berada dalam aturan WTO. Dengan diberlakukan bantuan subsidi ekspor maka menyebabkan harga komoditas-komoditas UE menjadi lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lain. Subsidi yang disediakan oleh UE tentunya sangat membantu sektor-sektor pertanian UE dalam melakukan produksi, pemasaran dan penjualan dengan kualitas yang baik dan harga yang dapat dipatok dibawah harga rata-rata dunia. Sementara itu, seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa

¹⁶ Dinan, Desmond. (1999). *Ever Closer Union: An Introduction to European Integration*. New York: Palgrave. Hal. 338.

perdagangan internasional WTO juga memasukan komoditas pertanian ke dalam agenda tersebut.¹⁷

Apabila mengacu kepada peraturan yang terkandung dalam perdagangan bebas (*free trade*), maka seharusnya subsidi dalam bentuk apapun tidak diperkenankan untuk diberlakukan. Pemerintah dengan memfasilitasi suatu sektor atau industri akan memberikan dampak yang tidak baik dan sehat dalam perdagangan internasional. Pemberian subsidi tersebut akan menciptakan perdagangan yang tidak adil, karena negara penerima subsidilah yang akan dapat bersaing dengan mudah terhadap komoditas pertanian dari negara lain yang tidak memiliki bantuan dari pemerintahnya

Pada akhirnya, CAP adalah yang menjadi pangkal permasalahan terjadinya kebuntuan pada perundingan perdagangan global di WTO, yang berhubungan pada ketidaksepakatan terhadap program subsidi yang dijalankan oleh UE melalui CAP tersebut. Disamping itu, selama kebijakan CAP tetap diterapkan oleh UE, hal tersebut akan merugikan para petani kecil di negara berkembang karena kalah bersaing harga dengan komoditas yang dihasilkan oleh UE.¹⁸

Namun, di sisi lain, dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Eropa, CAP sangatlah penting bagi UE agar tetap terjaga produktifitas pertaniannya dan daya saing yang tinggi dengan negara-negara lain. Kebijakan yang terkandung dalam CAP bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di WTO. Oleh karena itu, agar tetap dapat mempertahankan CAP demi kepentingan kepentingan ekonomi, Komisi Eropa mencari cara yang efektif, yaitu melalui negosiasi sebagai cara yang elegan dalam berhubungan dengan negara-negara lain di tingkat internasional, agar Komisi Eropa juga dapat memperoleh posisi yang kuat dalam berbagai perundingan.

¹⁷ Balaam, N.David., & Veseth, Michael. (2005). *Op Cit.* Hal. 250-251.

¹⁸ *Ibid.*

4.2. Posisi UE Terhadap Isu Pertanian dalam *Doha Development Agenda*.

Doha Development Agenda menekankan kepada komitmen bersama negara-negara anggota WTO terhadap isu akses pasar, subsidi ekspor dan bantuan domestik. Disamping itu, terdapat pembicaraan yang berkenaan juga dengan perlakuan terhadap negara berkembang.

Kebijakan pertanian UE yang diperjuangkan pada level internasional adalah hasil dari pembentukan kebijakan yang diputuskan oleh Komisi Eropa dan dikomunikasikan kepada institusi-institusi lain di regional Eropa. Posisi di setiap perundingan yang diikuti oleh Komisi Eropa merupakan cerminan dari kepentingan yang untuk memberikan keuntungan bagi negara-negara anggota UE. Posisi yang diperoleh Komisi Eropa pada level internasional adalah merupakan kepentingan bersama negara-negara anggota UE.

Dibawah ini adalah posisi dan sikap Komisi Eropa dalam menanggapi isu pertanian pada level WTO.

Tabel 4.1.
Posisi UE terhadap Isu Pertanian tingkat WTO

Tanggal	No. Proposal	Isu	Posisi
28 Jun 2000	European Communities : The Blue Box and Other Support Measures to Agriculture G/AG/NG/W/17	'Blue box' dan other support measures to agriculture (Domestic Support)	<p>UE berharap untuk terus mengajukan konsep 'blue box' harus dipertahankan seperti 'green box'.¹⁹</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peran dari 'blue box' tidak mempengaruhi pada harga dan volume produksi. • Perubahan pada CAP yang ditransformasikan kepada perubahan dari bantuan harga pasar ke pembayaran 'blue box', dengan adanya transparansi terhadap kebijakan dan mengembalikan keseimbangan pasar. • 'Blue box' diekspektasikan untuk melanjutkan reformasi

¹⁹ 'Green box' adalah sebagai ukuran dalam aktifitas kebijakan pertanian yang tidak memiliki atau hanya sedikit berdampak terhadap tidak adilnya perdagangan. Sedangkan 'Amber box' diartikan dan diklasifikasikan sebagai pengurangan komitmen. Istilah-istilah tersebut diciptakan pada saat Perjanjian Pertanian pada Putaran Uruguay.

			pertanian.
28 Jun 2000	European Communities : Food Quality – Improvement of Market Access Opportunities G/AG/NG/W/18	<i>Market Access, Food Specificity (food quality) dan Geographical Indications</i>	Mengajukan posisi terhadap produk dengan kualitas yang baik, yang berkaitan erat dengan akses pasar. <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai preferensi dari konsumen terhadap produk yang berkualitas berdasarkan pengetahuan tradisional dan asal geografis produk. • Tidak bermaksud untuk membuat batasan perdagangan (<i>trade barriers</i>). • Tidak hanya menguntungkan UE saja, negara berkembang mendapatkan keuntungan dengan meningkatnya kesempatan dalam produk berkualitas tinggi ini berdasar keadaan kekayaan alam dan berbagai macam produk makan di negara tersebut. • Untuk menjaga proteksi yang efektif melawan penggunaan nama yang ilegal pada sektor makanan dan minuman. • Untuk mengefektifkan akses pasar, dengan menggunakan produk yang memiliki nama yang legal di dalam pasar. • Untuk perlindungan konsumen dan kompetisi yang adil, melalui regulasi <i>labelling</i>, sebagai instrumen diferensiasi produk dan pilihan konsumen.

28 Jun 2000	European Communities : Animal Welfare and Trade in Agriculture G/AG/NG/W/19	<i>Animal Welfare</i>	<p>Melanjutkan program kesejahteraan hewan, menyajikan informasi kepada konsumen, dan memastikan perdagangan tidak mengganggu usaha UE dalam meningkatkan kesejahteraan hewan, serta meningkatkan daya saing UE dalam sektor pertanian dan industri makanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negosiasi hal ini, tidak berdasarkan kepada tipe baru dari halangan non-tarif. • Perkembangan perjanjian multilateral yang berhubungan dengan perlindungan terhadap kesejahteraan hewan. • <i>Labelling</i> yang tepat untuk menginformasikan produk. • Menyediakan kompensasi untuk mendukung biaya tambahan, dengan tidak ada dampak atau dampak yang minimal pada perdagangan dan produksi.
18 Sept 2000	European Communities : Export Competition Proposal G/AG/NG/W/34	<i>Export Competition: Export Subsidies</i>	<p>Mendukung subsidi ekspor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berpendapat bahwa sejak GATT subsidi ekspor untuk pertanian diperbolehkan. Sesuai dengan perjanjian pertanian, subsidi ekspor dikurangi melalui komitmen pengurangan pertahun sepanjang waktu implementasi. • Sejauh ini UE transparan dalam menggunakan subsidi ekspor dan tercatat serta mengikuti aturan WTO.
		<i>Export Competition: Export Credits</i>	<p>Mendukung subsidi ekspor.</p> <p>Penggunaan kredit ekspor memungkinkan untuk membantu suatu negara (negara berkembang/ terbelakang) yang berada dalam masalah likuiditas, tetapi berada dibawah aturan</p>

			WTO.
		<i>Export Competition: Abuse of Food Aid</i>	Mendukung untuk membuka diskusi tentang food aid, dengan catatan program tersebut tidak untuk merusak praktek komersial sektor pertanian di negara penerima.
		<i>Export Competition: State-Trading Enterprises (STEs)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • STE dapat membantu dalam penetnuan harga dan menciptakan pendapatan yang dapat digunakan untuk ekspor subsidi. • Peraturan dan regulasi WTO tentang STE harus diperkuat karena kurangnya kejelasan tentang aktifitasnya.
14 Des 2000	European Communities : Comprehensive Negotiating Proposal G/AG/NG/W/90	<i>Trade Issues: Market Access</i>	<p>Penurunan tarif berkala dan kompetisi produk berkualitas dan bereputasi berdasarkan asal geografis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formula penurunan tarif sesuai dengan <i>Uruguay Round</i>.²⁰ • <i>Tariff Rate Quotas</i> berkontribusi positif terhadap peningkatan akses pasar, dengan meningkatkan transparansi dan pembuatan peraturan. • Pengembangan akses pasar meningkatkan kompetisi yang adil dengan produk yang berkualitas dan bereputasi sesuai dengan asal dan pengetahuan tradisional.

²⁰ (a) it is a simple well-known and well-tested way of achieving across the board tariff reductions, and therefore an effective one; (b) it corresponds perfectly to the engagement taken in Article 20 of progressive reduction in protection which applies to all Members; and (c) it allows for sufficient flexibility in lowering tariffs, bearing in mind that this process is more advanced in some agricultural sectors than in others and, without making any a priori exclusions, enables Members to take into account the particular situation of specific sectors.

		<i>Trade Issues: Export Competition</i>	<p>Subsidi ekspor digunakan sebagai dasar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan kredit ekspor searusnya dimasukkan ke dalam peraturan dan praktek WTO. • Kecurangan dalam pemberian <i>food aid</i> harus dihindari dengan membuat <i>code of conduct</i> dan melalui revisi serta penguatan peraturan. • STE dapat membantu dalam penetnuan harga dan menciptakan pendapatan yang dapat digunakan untuk ekspor subsidi.
		<i>Trade Issues: Domestic Support</i>	<p>Bantuan domestik yang terukur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep '<i>blue</i>' dan '<i>green</i>' <i>boxes</i> tetap di pertahankan, serta mengaplikasikan subsidi pada '<i>amber box</i>'. • Proses perubahan didasarkan pada pengurangan secara berkala <i>Aggregate Measures of Support</i> (AMS).
		<i>Non-Trade Concerns</i>	<p>Memposisikan diri untuk terus berkontribusi terhadap <i>sustainable development, protection of environment, the sustained vitality of rural areas and poverty.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan untuk perlindungan lingkungan dan pengembangan daerah pedesaan harus diakomodasi di dalam perjanjian pertanian. • <i>Food safety</i> dikonsentrasikan melalui ukuran yang jelas. • <i>Consumer concerns</i> terkait dengan produksi dan prosesing yang harus diinformasikan melalui skema <i>labelling</i> yang sesuai dengan aturan WTO. • Kompensasi yang tepat dan sesuai untuk <i>protection of</i>

			<i>the welfare of animals.</i>
		<i>Developing Countries/ Special and Differential Treatment</i>	<p>Mengajukan kepada seluruh negara maju secara intensif membantu negara berkembang dengan implementasi dan menggunakan perjanjian WTO yang sesuai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Domestic support</i> akan dapat membantu pengembangan daerah pedesaan dan <i>food security</i>, dengan cara 'green box' dikecualikan pada komitmen pengurangan. • <i>Trade preferences</i> kepada produk negara berkembang dari negara maju, guna meningkatkan akses pasar dan liberalisasi multilateral.
Mar 2001 – Feb 2002 (Phase 2)	'non-paper'	<i>Export Competition: Export Credits</i>	<p>Mendukung subsidi ekspor dan kredit ekspor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kredit ekspor tidak mengambil banyak dari subsidi, dan berguna sebagai keamanan pangan dari negara importer. • Dapat dilakukan pengurangan secara berkala.
	'non-paper'	<i>Export Competition: Abuse of Food Aid</i>	<p>Food aid sebagai tujuan kegiatan kemanusiaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dapat memberikan keuntungan kepada negara penerima dari pasokan makanan, sampai bantuan teknis untuk meningkatkan produksi domestiknya. • Diperlukan mekanisme khusus untuk mengatur program ini agar tidak merugikan produksi domestik negara penerima.
	'non-paper'	<i>Food Safety</i>	<p>Food safety menjadi salah satu tujuan utama.</p> <p>Kepentingan baru para</p>

			konsumen tentang rekayasa genetika organisme, wabah penyakit mulut dan kuku, dan zat beracun dioxin.
	'non-paper'	<i>Consumer information & labelling.</i>	<p>Penekanan kepada <i>labelling</i> untuk menangani masalah non-perdagangan, tanpa mengganggu perdagangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membantu konsumen untuk mendapatkan informasi terhadap produk. • Meyakinkan konsumen bahwa produk berlabel akan meningkatkan akses pasar.
	'non-paper'	<i>Geographical Indications dan Food Quality</i>	<p>Mengajukan indikasi geografis sebagai penunjang kualitas makanan.</p> <p>Asal usul makanan dapat menentukan kualitas makanan tersebut. Baik halnya untuk diinformasikan melalui label kepada konsumen.</p>
	'non-paper'	<i>Domestic Support: 'Amber Box'</i>	Berposisi untuk secara bertahap akan mengurangi, tetapi tidak menghilangkan.
	'non-paper'	<i>Domestic Support: 'Green Box'</i>	<p>Mempertahankan 'Green Box'.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karena tidak mengganggu perdagangan. • Memfasilitasi untuk menutupi biaya tambahan untuk perlindungan kesejahteraan hewan, ketahanan pangan dan kemiskinan.
Feb 2003	'non-paper'	<i>Market Access: Revised 1st draft 'modalities'</i>	Penggunaan pendekatan 'blended formula'²¹ untuk pembukaan akses pasar.

²¹ a "blended formula" in which products are separated into three groups, the number of products in each to be negotiated. One group of tariffs would be cut according to the Uruguay Round approach, with the average and minimum reductions to be negotiated, and tariff quotas used to provide market access if tariffs remain high. A second would use the Swiss formula, again leaving for negotiation the coefficient that determines the final maximum tariff level. A third group would be duty-free. If tariffs exceed an unspecified maximum, they would either have to be cut to that maximum or market access would have to be provided through negotiated tariff quotas.

Agust 2003	JOB(03)/157 (restricted) dan 'non-paper'	<i>The Draft Frameworks on Tariffs Quotas</i>	Draft UE mengacu kepada kuota tarif dalam 2 konteks: menciptakan akses pasar pada produk tertentu pada Putaran Uruguay reduksi formula; dan menggunakan tarif yang lebih tinggi dari maksimum.²²
Mar 2004	'non-paper'	<i>Domestic Support: The Draft Frameworks on the Amber box</i>	Pengurangan bantuan domestik menggunakan persentase secara berkala, tidak dihapuskan. Mengajukan pendapat bahwa negara-negara yang memiliki dampak lebih besar harus lebih besar pula usahanya.

Sumber: Data diolah kembali dari berbagai sumber²³.

Berdasarkan data dan informasi yang tersaji pada tabel 4.1 diatas, Komisi Eropa sangat serius dalam menanggapi kebijakan pertaniannya, yang tertuang dalam CAP. Komisi Eropa menilai CAP adalah kebijakan UE yang sangat penting bagi kehidupan negara-negara anggota UE. Arti penting CAP UE sangat tercermin dari sisi ekonomi dan politik domestik negara-negara anggota.²⁴ KomisiUE dengan melakukan negosiasi pada level internasional ini berusaha untuk tetap dapat memperjuangkan dan tetap melaksanakankebijakan tersebut sampai dengan waktu dimana sudah dianggap siap oleh para pembuat kebijakan UE. Apabila sikap tersebut tidak diimplementasikan, Komisi Eropa akan menghadapi persoalan yang serius dalam wilayah UE dan negara anggota UE.

Secara garis besar, Komisi Eropa memosisikan diri untuk selalu menolak dalam melakukan pemenuhan komitmen Doha dan mengubah secara besar-

²² Sedangkan draft yang dikeluarkan oleh G-20 mengajukan bahwa kuota negara maju harus ditingkatkan dengan persentasi dari konsumsi domestik dan dalam kuta tarif harus dihapuskan, beserta dengan hal-hal lain melalui negosiasi.

²³ http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd08_export_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd10_access_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd11_ssg_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd12_market_e.htm
<http://www.choike.org/2009/eng/informes/3646.html>
<http://www.twinside.org.sg/title/twninfo40.htm>
<http://ec.europa.eu/agriculture/publi/map/brief4.pdf>
<http://ec.europa.eu/agriculture/publi/map/brief3.pdf>

²⁴ Telah dibahas pada Bab 2, sub bab 2.3., tentang arti penting CAP bagi UE

besaran pada kebijakan pertaniannya. Beberapa hal yang menjadi hal penting dalam perundingan ini yang tertuang dalam *Doha Development Agenda* adalah akses pasar, subsidi ekspor dan bantuan domestik. Ketiga hal tersebut yang menjadi pokok pembicaraan dalam komitmen bersama pertanian. Komisi Eropa didesak untuk mengubah secara komprehensif kebijakan subsidi sektor pertaniannya, karena dianggap tidak mencerminkan perdagangan yang tidak sesuai dengan agenda bersama jika kebijakan tersebut tetap dijalankan.

Posisi dan sikap Komisi Eropa dipertegas dengan dikeluarkannya proposal **G/AG/NG/W/17**, 28 Juni 2000, tidak lama setelah wacana pembahasan perdagangan sektor pertanian dibuka pada fase pertama 2000-2001 kegiatan perundingan WTO. Komisi Eropa mempertahankan konsep '*blue box*' sebagai mekanisme untuk mendukung domestik. Komisi Eropa menjamin bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi kegiatan perdagangan. Pada tanggal yang sama, Komisi Eropa juga memiliki proposal **G/AG/NG/W/18** tanggal 28 Juni 2000, memposisikan diri akan mengurangi tarif secara berkala, tetapi tidak menghapuskan tarifnya. Komisi Eropa mengajukan untuk membicarakan produk dengan kualitas yang baik, yang berkaitan erat dengan akses pasar. Alasan ini diajukan oleh Komisi Eropa tidak bermaksud untuk membuat hambatan perdagangan jenis baru, tetapi lebih mengarahkan kepada sebagai pemberian produk dengan kualitas yang baik kepada konsumen yang mana mereka dapat pilih. Pada kesempatan yang sama, Komisi Eropa juga mengeluarkan proposal **G/AG/NG/W/19** tentang keseriusannya pada kesejahteraan hewan dan menegaskan agar perdagangan tidak mengganggu usaha UE dalam meningkatkan kesejahteraan hewan, serta meningkatkan daya saing UE dalam sektor pertanian dan industri makanan.

Sama halnya untuk isu pertanian yang lainnya, Komisi Eropa menolak untuk menghapuskan subsidi pertaniannya seperti yang tertuang pada proposal **G/AG/NG/W/34**, tertanggal 18 September 2000, bahwa tetap untuk menjalankan subsidi pertaniannya. Komisi Eropa sejauh ini tetap transparan terhadap WTO dan tidak menyalahi aturan yang ada, seperti di GATT. Hal seperti ini yang memposisikan Komisi Eropa untuk tetap bersikukuh untuk mempertahankan CAP. Disamping itu, isu *non-trade* menjadi salah satu alasan UE untuk tetap terus

memberikan bantuannya kepada negara anggotanya, seperti isu lingkungan, pengembangan desa untuk peningkatan standar hidup orang pedesaan, kesejahteraan hewan, dan lain-lain.

Satu lagi proposal resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa pada tanggal 14 Desember 2000 sebagai posisi awal UE dalam isu pertanian ini adalah **G/AG/NG/W/90** yang berisikan tentang proposal perundingan yang komprehensif. Komisi Eropa menegaskan kembali posisinya pada setiap isu, yaitu penurunan tarif secara berkala dan produk berkualitas (*market access*); subsidi UE sebagai dasar dan tidak menyalahi aturan GATT (*export competition*); tetap memberikan bantuan domestik, tetapi terukur yaitu mempertahankan konsep 'blue' dan 'green'boxes (*domestik support*); terus berkontribusi terhadap pembangunan, perlindungan lingkungan, pentingnya daerah pedesaan dan kemiskinan (*non-trade concerns*); dan mengajukan kepada seluruh negara maju untuk membantu negara berkembang dengan mengimplementasikan dan menggunakan perjanjian WTO yang sesuai, serta mempromosikan bantuan domestik dapat membantu perkembangan (*developing countries / special and differential treatment*).

Sepanjang kurun waktu Maret 2001 sampai dengan Februari 2002 (*phase 2*), Komisi Eropa tetap bersikukuh dengan posisi awalnya yang tidak menghendaki adanya perubahan secara radikal pada kebijakan pertanian. Berbagai macam alasan UE melalui dokumen resmi ataupun tanpa dokumen disampaikan oleh perwakilan UE atas tidak setuju untuk menghapus subsidi pertanian UE. Komisi Eropa berpendapat bahwa, subsidi yang diberikan kepada negara anggotanya tidaklah mengganggu dan merusak perdagangan internasional, tetapi untuk tujuan lainnya. Komisi Eropa bersikukuh berada di posisi bahwa tujuannya adalah untuk kepentingan lingkungan, pembangunan pedesaan dan peningkatan kesejahteraan orang-orang pedesaan. Komisi Eropa sangat berkepentingan dalam isu *non-trade* tersebut sebagai kepentingan domestiknya. Kepentingan tersebut merupakan kepentingan domestik UE yang ingin juga dinegosiasikan di level internasional. Dengan alasan-alasan tersebut, dijadikan Komisi Eropa untuk terus dapat melakukan bantuan secara finansial bagi negara-negara anggota UE. Keadaan tersebut terus berlangsung sepanjang tahun 2004.

Hingga sampai tahun 2005 (periode terakhir pada penelitian ini), Komisi Eropa mengeluarkan penawaran terakhir terkait dengan isu pertanian ini pada negosiasi tingkat WTO. Untuk pertama kalinya, Komisi Eropa memposisikan diri bahwa setuju untuk melakukan pengurangan bantuan dalam bentuk apapun, tetapi dilakukan secara berkala, serta tidak dihilangkan seluruhnya. Akan tetapi, perubahan yang dilakukan oleh Komisi Eropa tersebut, tidak terlihat cukup signifikan dan berpengaruh terhadap perdagangan pertanian internasional, dipandang oleh anggota WTO yang lain. Di dalam proposal *Monitoring Agri-Trade Policy* pada November 2005, mengajukan metode yang adil, transparan dan konsisten. Dengan mengajukan formula yang baru, pendekatan yang dilakukan oleh Komisi Eropa sesuai dengan kerangka perjanjian, dan menjamin level akses pasar (produk sensitif) tidak melebihi dari level pada pengurangan tarif. Pada kesempatan yang sama, Komisi Eropa mengeluarkan 'penawaran' terakhir yaitu bermaksud untuk melakukan pengurangan bantuan yang merusak trade secara berkala, menghilangkan subsidi ekspor, secara berkala meningkatkan akses pasar UE dan memahami pentingnya perlakuan khusus dan yang berbeda kepada negara berkembang dari ketiga pilar. Penawaran tersebut adalah sebagai posisi UE sebelum dimulainya 6th *ministerial meeting* di Hongkong pada Desember 2005.

Walaupun desakan yang didapatkan oleh Komisi Eropa dari berbagai macam arah, Komisi Eropa tetap memegang teguh kepada sikapnya untuk tetap mempertahankan CAP dalam konferensi yang dilaksanakan di Hongkong tersebut. Bahkan UE menuai hasil yang memuaskan. Komisi Eropa dapat melanjutkan bantuan subsidi dan kebijakan tarif yang sesuai dengan ketentuan WTO sebelumnya sampai dengan tahun 2013, seperti yang diharapkan oleh UE.

Dari rangkaian sikap dan posisi UE di berbagai perundingan, Komisi Eropa dapat mempertahankan kepentingannya, sehingga tidak mengharuskan untuk mengubah kebijakannya. Diplomasi yang keras yang dijalankan oleh UE menyebabkan perundingan sektor pertanian WTO sering mengalami *deadlock* di berbagai kesempatan.

Kekuatan (*power*) Komisi Eropa sangat terlihat dalam berdiplomasi di level internasional. Komisi Eropa menggunakan *power*, yang dalam hal ini bukan

berupa kekuatan militer, untuk dapat mempertahankan kepentingan pertaniannya. *Power* yang dimiliki Komisi Eropa dapat mempengaruhi kebijakan yang hendak diciptakan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Kekuatan ekonomi yang dimiliki UE dapat dimanfaatkan untuk menekan negara anggota lainnya agar mengikuti proposal atau keinginan UE. Sehingga, Komisi Eropa dapat memperoleh keuntungan dalam berdiplomasi tingkat internasional tersebut dengan menggunakan kekuatan ekonomi sebagai 'senjata' dengan negara anggota yang lain.

Kebijakan pertanian Eropa yang tertuang dalam pilar pertama UE merupakan suatu kebijakan yang sangat penting bagi kepentingan Komisi Eropa dan negara-negara anggota UE. Dengan kata lain, Komisi Eropa sangat berhati-hati di dalam setiap tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pertanian tersebut. Komisi Eropa sudah pasti memiliki suatu ketentuan dan kepastian terhadap aturan-aturan yang tertuang dalam pilar pertama tersebut terutama pada sektor pertaniannya. Ketentuan tersebut yang dapat memberikan batasan terhadap Komisi Eropa sampai sejauh mana ketentuan-ketentuan yang sudah tertuang dalam peraturan tersebut dapat dirundingkan dan dinegosiasikan. Berdasarkan dari seluruh proposal yang menunjukkan posisi Komisi Eropa dalam perundingan pertanian tersebut, sehingga dapat diidentifikasi posisi UE untuk dapat memenuhi dan tidak dapat memenuhi komitmen bersama yang ada dalam agenda Doha.

4.2.1. Posisi Komisi Eropa: Memenuhi atau Tidak Memenuhi Isi Agenda

Komisi Eropa dalam rangka memenuhi isi agenda dapat dikatakan sudah mempertimbangkan segala baik dan buruknya jika melakukan pemenuhan agenda tersebut. Walaupun agenda tersebut berhubungan komitmen bersama untuk menciptakan suatu perdagangan internasional sektor pertanian di antara negara-negara anggota WTO, tetapi sudah tentu segala keputusan yang dihasilkan oleh Komisi agar tidak merugikan UE.

Berdasarkan proposal yang menentukan posisi Komisi Eropa dalam agenda Doha, tidak banyak posisi Komisi yang dapat memenuhi komitmen

bersama tersebut. Teridentifikasi hanya beberapa hal saja yang dapat dipenuhi oleh Komisi terkait dengan agenda tersebut, seperti contoh pada penurunan tarif, *non-trade concerns*, *Developing Countries/ Special and Differential Treatment* dan perubahan pada bantuan domestik.

Berdasarkan pada data yang sudah terangkum di bagian sebelumnya, proposal Komisi Eropa, **G/AG/NG/W/18** tanggal 28 Juni 2000, mencerminkan suatu sikap Komisi Eropa yang bersedia untuk mengurangi tarif impor secara berkala. Hal ini merupakan respon Komisi terhadap agenda dalam akses pasar yang tertuang dalam substansi agenda Doha. Pada proposal yang sama, Komisi juga mengajukan kompetisi yang berbasis produk yang berkualitas dan bereputasi baik berdasarkan asal geografisnya. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa, cara tersebut digunakan oleh Komisi Eropa untuk dapat memenuhi komitmen yang ada dalam agendan, namun disisi lain tetap dapat melindungi sektor pertaniannya.

Pada kesempatan yang sama, Komisi Eropa juga mengeluarkan proposal **G/AG/NG/W/19** tentang keseriusannya pada kesejahteraan hewan dan menegaskan agar perdagangan tidak mengganggu usaha Komisi Eropa dalam meningkatkan kesejahteraan hewan, serta meningkatkan daya saing UE dalam sektor pertanian dan industri makanan. Namun dalam penjelasannya, tersirat dalam proposal ini bahwa Komisi tetap membutuhkan bantuan finansial CAP yang diberikan kepada pemerintah nasional untuk dapat menjalankan program tersebut. Dari hal ini, dapat terlihat, Komisi Eropa berposisi untuk memenuhi isu non-perdagangan, akan tetapi tetap membutuhkan distribusi bantuan finansial terhadap negara anggotanya. Disamping itu, isu *non-trade* yang lain yang menjadi salah satu alasan UE untuk tetap terus memberikan bantuannya kepada negara anggotanya, seperti isu lingkungan, pengembangan desa untuk peningkatan standar hidup orang pedesaan, kesejahteraan hewan, dan lain-lain.

Sebagai salah satu bagian dari proposal Komisi Eropa **G/AG/NG/W/90** memperlihatkan posisi UE dalam memperhatikan negara berkembang, dengan mengimplementasikan dan menggunakan perjanjian WTO yang sesuai, serta mempromosikan bantuan domestik dapat membantu perkembangan. *Trade preferences* yang digunakan terhadap produk negara berkembang, dimaksudkan

guna meningkatkan akses pasar dan liberalisasi multilateral. Dengan posisi ini, Komisi Eropa memperlihatkan respons yang positif terhadap negara berkembang yang tertuang dalam agenda Doha.

Disamping Komisi Eropa dapat memenuhi tuntutan isi agenda Doha, terdapat pula hal-hal yang tidak dapat diikuti, terutama pada agenda reduksi subsidi ekspor. Posisi Komisi Eropa yang tidak dapat memenuhi isi agenda bersama dalam *Doha Round* tersebut, tentunya merupakan refleksi kepentingan UE secara keseluruhan yang tidak dapat dinegosiasikan kembali di dalam level internasional. Refleksi kepentingan Komisi Eropa tersebut tertuang di dalam pilar pertama yang terkait dengan sektor pertanian.

Komisi Eropa mengeluarkan proposal resmi **G/AG/NG/W/90** pada tanggal 14 Desember 2000 yang merupakan posisi awal UE dalam isu pertanian secara komprehensif. Komisi Eropa menegaskan posisinya pada setiap isu, yaitu penurunan tarif secara berkala dan produk berkualitas (*market access*); subsidi UE sebagai dasar dan tidak menyalahi aturan GATT (*export competition*); tetap memberikan bantuan domestik, tetapi terukur yaitu mempertahankan konsep 'blue' dan 'green' boxes (*domestic support*); dan terus berkontribusi terhadap pembangunan, perlindungan lingkungan, pentingnya daerah pedesaan dan kemiskinan (*non-trade concerns*). Ketiga *cluster* yang disebutkan di atas, yaitu *market access*, *export* dan *domestic support* merupakan komitmen bersama dalam agenda Doha, dimana setiap negara anggota WTO bersepakat untuk menyukseskan agenda tersebut dengan melakukan pengurangan bahkan penghapusan ketiga aspek tersebut. *Non-trade concerns* secara implisit juga terdapat di dalam komitmen bersama dalam kesepakatan tersebut.

Posisi Komisi Eropa dalam proposal tersebut sebagai suatu penegasan yang ada dalam proposal-proposal sebelumnya, yaitu proposal **G/AG/NG/W/17**, 28 Juni 2000, yang mana Komisi mempertahankan konsep 'blue box' sebagai mekanisme untuk mendukung domestik. Komisi Eropa menjamin bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi kegiatan perdagangan. Lalu proposal **G/AG/NG/W/19** yang memosisikan Komisi untuk melakukan bantuan domestik agar tercapainya program kesejahteraan hewan.

Tidak hanya itu saja Komisi Eropa berpendapat untuk tidak memenuhi agenda Doha, sepanjang Maret 2001 sampai Februari 2002, Komisi Eropa tetap memperjuangkan posisi awalnya yang tidak menghendaki perubahan pada CAP yang berkaitan dengan akses pasar, subsidi dan bantuan domestik sebagai tanggapan terhadap *Doha Development Agenda*. Dengan alasan-alasan tersebut, dijadikan UE untuk terus dapat melakukan bantuan secara finansial bagi negara-negara anggota UE. Keadaan tersebut terus berlangsung sepanjang tahun 2004.

Secara teknis dalam proposal-proposal Komisi Eropa, terdapat posisi-posisi yang diajukan oleh Komisi Eropa adalah merupakan regulasi yang masih dapat dinegosiasikan dan yang tidak dapat dinegosiasikan. Berikut identifikasi posisi Komisi Eropa dalam menanggapi komitmen *Doha Development Agenda*, berdasarkan data dan informasi yang terkumpul di dalam proposal-proposal Komisi Eropa.

Tabel 4.2.
Posisi Komisi Eropa Menanggapi Mandat Agenda Doha

	Dipenuhi	Tidak Dipenuhi
<i>Market access</i>	√	
<i>Exports subsidies</i>		√
<i>Domestic support</i>		√
<i>Non-trade concerns</i>	√	
<i>Developing Countries/ Special and Differential Action</i>	√	

4.2.2. Negosiasi Komisi Eropa pada Perundingan WTO

Berdasarkan identifikasi isu-isu dari agenda Doha, dapat dilihat perbedaan sikap dari Komisi Eropa untuk memenuhi ataupun tidak memenuhi mandat tersebut. Pola identifikasi membuktikan bahwa untuk agenda perundingan WTO yang dapat dipenuhi oleh Komisi Eropa yakni mengenai *market access*, *non-trade concerns*, dan *deveolping countries / special and differential action*, merupakan

isu-isu yang tidak memiliki dampak yang berskala besar terhadap kondisi perekonomian UE secara langsung. Hal ini terbukti dengan proposal Komisi Eropa yang memiliki fleksibilitas terhadap agenda tersebut.²⁵

Sedangkan merujuk pada agenda Doha tentang *export subsidies* dan *domestic support*, dapat dilihat bahwa Komisi Eropa berkeras dan berjuang untuk tidak memenuhi tuntutan terhadap dua isu tersebut. Hal itu dapat diteliti sebagai dua permasalahan yang merupakan hal teknis yang sudah tercantum secara jelas dalam Pilar 1 UE, dimana sektor pertanian adalah suatu kebijakan yang sangat dibutuhkan oleh Komisi Eropa untuk mendanai dan mendukung produktifitas pertanian.²⁶ Subsidi ekspor dan bantuan domestik adalah dua hal pendukung dalam CAP yang sangat berperan penting dalam pertanian Eropa.

Sikap Komisi Eropa dalam perundingan WTO menanggapi permasalahan-permasalahan yang kemudian berujung pada *deadlock* agenda Doha, merupakan suatu bukti dari tingkat kepentingan *export subsidies* dan *domestic support* dalam masyarakat Eropa. Kedua hal tersebut merupakan cerminan nyata dari permasalahan yang memiliki keabsahan secara teknis dan tidak bisa diganggu gugat dari eksternal Uni Eropa. Maka munculnya perlakuan yang berbeda terhadap isu-isu dalam Agenda Doha merupakan penentu arah diplomasi yang digunakan Eropa untuk mempertahankan CAP-nya dalam meja perundingan WTO, yaitu melalui negosiasi teknis. Negosiasi teknis itu merupakan bentuk paling sesuai yang dapat diaplikasikan oleh Komisi Eropa untuk membawa kepentingan Eropa, yang pada kebijakannya merupakan hal teknis, untuk diperjuangkan di level WTO.

²⁵ Lihat tabel 4.1, untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai proposal yang diajukan oleh Komisi Eropa.

²⁶ Lihat bab 2, pada sub bab 2.2.1, mengenai pilar 1 Uni Eropa